



BAB III

PEMIKIRAN K.H. ACHMAD SIDDIQ TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA

A. Biografi K.H. Achmad Siddiq

K.H. Achmad Siddiq, yang mempunyai nama kecil Achmad Muhammad Hasan, lahir di Jember pada hari Ahad legi, 24 Januari 1926 (10 Rajab 1344), atau tujuh hari sebelum kelahiran *Jam'iyah* Nahdlatul Ulama, dan meninggal dunia pada hari Rabu, 23 Januari 1991 (7 Rajab 1411) di Surabaya. Achmad Siddiq adalah putra bungsu Kiai Muhammad Siddiq dari isteri keduanya, Nyai Hj. Zakiah (Nyai Maryam binti K.H. Yusuf). Achmad Siddiq merupakan putra ke-25 sekaligus anak bungsu dari pendiri Pondok Pesantren Islam As-Siddiqi Putra (astra),⁹⁴ dari Nyai Zakiah yang lebih dikenal dengan Nyai Maryam.⁹⁵

Ketika berusia dua tahun, K.H. Achmad Siddiq sudah ditinggal ibunya yang wafat di Laut Merah dalam perjalanan pulang haji dari tanah suci, Makkah. Tujuh tahun kemudian, ayahnya tutup usia ketika Achmad Siddiq belum genap berusia sepuluh tahun. Sejak itu, kakaknya, Mahfudz Siddiq mendapat tugas untuk membesarkan Achmad Siddiq. Dari pengasuhan inilah Achmad Siddiq banyak mewarisi sifat dan karakter sang kakak. Kiai Achmad Siddiq memiliki

⁹⁴ Syamsun Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq; Membumikan Tasawuf*' (Surabaya : Erlangga, tt), 13.

⁹⁵ *Ibid.*, 14.



watak sabar, tenang, dan sangat cerdas. Wawasan berpikirnya amat luas, baik dalam ilmu agama maupun pengetahuan umum.⁹⁶

Perjalanan hidup Kiai Achmad dimulai dari bawah, “Saya pernah menjual baju-baju di pasar,” dan hasil usahanya hanya bisa digunakan untuk membeli rokok. Kehidupannya yang sederhana dan memprihatinkan tidak lantas menghalanginya untuk menikah. Pada tanggal 23 Juni 1947, ia mempersunting seorang gadis bernama sholihah, asal desa Mangunsari, Tulungagung, Jawa Timur. Pada awal perkawinannya, Kiai Achmad Siddiq masih merasakan masa-masa yang sulit. Namun, perlahan tapi pasti. Nasibnya mulai membaik ketika ia menjadi penulis pribadi gurunya, K.H, Wahid Hasyim yang menjabat Menteri Agama.

Memasuki tahun ke-8 perkawinannya dirundung kesedihan dengan wafatnya isteri tercinta pada tahun 1955. Segera setelah itu-pada tahun yang sama-ia pun menikahi H.J. Nihayah, adik ketiga dari almarhumah isterinya. Dengan Isteri pertamanya Nyai Sholihah binti K.H. Abdul Mujib, Kiai Achmad Siddiq dikarunia lima orang anak, dan delapan anak dari Nyai H.J. Nihayah.⁹⁷

Menurut silsilah, Achmad Siddiq adalah keturunan ke-15 dari Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Islam di Pajang. Secara lengkap dapat disebutkan, Achmad Siddiq putra Kiai Muhammad Siddiq putra Kiai Abdullah (Lasem) putra

⁹⁶ *Ibid.*, 15.

⁹⁷ *Ibid.*, 16.



Kiai Muhammad Shaleh Tirtowijoyo putra Kiai Asy'ari putra Kiai Adra'i putra Kiai Muhammad Yusuf putra Mbah Sambu putra Raden Sumonegro putra Raden Pringgokusumo (Adipati Lasem III) putra Joyonegoro putra Pangeran Joyokusumo putra Hadijoyo putra Pangeran Benowo II, putra Pangeran Benowo I putra Sultan Hadiwijoyo alias Joko Tingkir alias Mas Karebet. Dari garis Mbah Sambu itu silsilah K.H. Achmad Siddiq bertemu dengan K.H. Hasyim Asy'ari.⁹⁸

Dalam menempuh studi, Kiai Achmad Siddiq tidak belajar kepada satu guru atau kiai saja. sedikitnya ada lima orang yang banyak memengaruhi jalan hidup Kiai Achmad Siddiq, baik dalam pemikiran maupun sepak terjangnya. Kelima orang tersebut adalah K.H. Muhammad Siddiq, ayahandanya sendiri; K.H. Hasyim Asy'ari, Pendiri dan pengasuh pondok pesantren Tebuireng. A. Wahid Hasyim, K.H. Mahfudz Siddiq, kakaknya sendiri yang pernah menjabat ketua PBNU di zaman Jepang, dan K. H. Abdul Hamid Pasuruan. Orang yang disebut terakhir ini malah dianggap sangat berperan besar dalam membentuk perilaku tasawufnya. Bahkan, Kiai Achmad pernah menuturkan bahwa K.H. Abdul Hamid Pasuruan adalah pengayom dan pembimbingnya di bidang spriritual.⁹⁹

Pengalaman pendidikan Kiai Achmad Siddiq dalam menempuh studi, Kiai Achmad tidak belajar kepada satu guru atau Kiai saja. Sedikitnya ada lima

⁹⁸ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am Nahdltul Ulama*, (Yogyakarta : LTN-Nu, 1995), 142.

⁹⁹ *Ibid.*, 17.



orang yang banyak mempengaruhi jalan hidup Kiai Achmad Siddiq, baik dalam pemikiran maupun sepak terjangnya. Kelima orang tersebut adalah K.H. Muhammad Siddiq, ayahandanya sendiri; K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri NU dan pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang; K.H. A. Wahid Hasyim, K.H. Mahfudz Siddiq, kakaknya sendiri yang pernah menjabat ketua PBNU di zaman Jepang, dan K.H. Abdul Hamid Pasuruan. K.H. Abdul Hamid dianggap sangat berperan besar dalam membentuk perilaku tasawuf Kiai Achmad Siddiq. Kiai Achmad Siddiq pernah menuturkan bahwa K.H. Abdul Hamid Pasuruan adalah pengayom dan pembimbingnya di bidang spiritual.¹⁰⁰

Sementara itu tokoh lain yang tidak dipublikasikan tetapi cukup berpengaruh ialah K.H. Hamim Djazuli (Gus Miek) yang dikenal sebagai tokoh kontroversial, seorang tokoh seaman al-Qur'an, dan putra K.H. Djazuli Utsman Ploso Kediri; serta Ir. Soekarno, Presiden pertama RI. Namun tokoh yang amat ia idolakan ialah Nabi Muhammad Saw.¹⁰¹

Selain berguru kepada ayahanda dan kakaknya, Kiai Achmad Siddiq mulai memasuki Tebuireng, setelah belajar pada Sekolah Rakyat Islam dan Belajar agaan dengan ayahnya di Jember. Ia belajar kitab-kitab agama pada Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari yang antara lain; *Tuhfatul Athfal*, *Fathul Qarib* (pada tingkat dasar), *Tahrir*, *Fathul Mu'in* (Fiqih), *Alfiyah ibn Malik* (Ilmu

¹⁰⁰ Syamsun Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq*, 17.

¹⁰¹ *Ibid.*, 18.



Bahasa Arab), *Arudl wa Qawafi* (sastra), *Jawahir al-Kalamiyah* (teologi), *Waraqat* (Usul Fiqih), Ilmu Falak, *Mizan al-Qawim*, *Uqudul Juman* (sastra), serta *Tafsir Baidlowi* dan *Ihya Ulumuddin*.¹⁰²

Achmad Siddiq juga masuk ke dalam madrasah Nidhamiyah-nya K.H. Wahid Hasyim. Bahkan Achmad Siddiq memperoleh kesempatan menjadi ‘kelompok intelektual santri’ yang secara khusus dikader oleh K.H. Wahid Hasyim. Dalam kelompok terbatas itulah, K.H. Wahid Hasyim selalu mendiskusikan perkembangan politik nasional.¹⁰³ Berkat kecerdasan, kesahajaan, dan kemampuan Kiai Achmad Siddiq di bidang menulis dan berpidato, tumbuhlah kedekatannya dengan K.H. A. Wahid Hasyim. Perhatian Gus Wahid sangat besar kepadanya, mulai dari urusan belajar sampai menyusun sebuah konsep kegiatan atau keilmuan. Bahkan, Kiai Achmad Siddiq masuk barisan depan daftar “antrian didikan khusus Gus Wahid, membawahi Saifuddin Zuhri dan Idham Chalid. Sebagai santri garda depan, ia pun diangkat menjadi pengajar pesantren, kader utama, dan selanjutnya menjadi sekretaris pribadi K.H. A. Wahid Hasyim.¹⁰⁴

Di Tebuireng, Kiai Achmad berkawan dengan Kiai A. Muchith Muzadi.¹⁰⁵ Bahkan menurut penuturan Kiai A. Muchit Muzadi, Kiai Achmad pernah satu

¹⁰² Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais ‘Am*, 145.

¹⁰³ *Ibid.*, 146.

¹⁰⁴ Syamsun Ni’am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq*, 20.

¹⁰⁵ *Ibid.*, 19.



kamar dengannya. Kiai Muchith Muzadi yang pernah menjadi sekretaris pribadi Kiai Achmad Siddiq mengakui kecerdasan Kiai Achmad. Salah satunya ketika Kiai Achmad meminta Kiai Muchith untuk menuliskan makalahnya tentang hubungan Islam dan Pancasila untuk monas Situbondo. Selama proses pembuatan itu Kiai Achmad meminta Kiai Muchith Muzadi agar tidak memberitahu isi atau rumusan makalahnyakepada siapapun,termasuk isterinya Kiai Muchith.¹⁰⁶

Karir dan perjuangan K.H. Achmad Siddiq dimulai pada tahun 1945 ketika ia berusia 19 tahun, Achmad Siddiq menjadi kordinator GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia untuk daerah Jember dan Besuki. Aktivasnya di organisasi kepemudaan yang berafiliasi pada Masyumi, tampaknya membuat hubungannya dengan K.H. A. Wahid Hasyim tak pernah putus.¹⁰⁷ Karirnya di GPII menanjak dan mengantarkan dirinya menjadi pengurus tingkat provinsi Jawa Timur. Dan, pada Pemilu 1955 ia terpilih sebagai anggota DPR Daerah Sementara Jember. Perjuangannya mempertahankan kemerdekaan RI juga tak bisa dinafikan, khususnya perjuangan bersama Laskar Mujahidin/PPPR (Pusat Pimpinan Perjuangan Rakyat) pada tahun 1947.¹⁰⁸

¹⁰⁶ K.H. Muchith Muzadi, *Wawancara*, di Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, hari Minggu.

¹⁰⁷ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am*, 146.

¹⁰⁸ Syamsun Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq*, 22.



Pengabdian Kiai Achmad di pemerintahan berawal dari posisi sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Situbondo dan Bondowoso, Jawa Timur. Kemudian meningkat menjadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur sampai tahun 1971. Pada tahun 1955-1957 dan 1971 Kiai Achmad menjadi anggota DPR RI.¹⁰⁹ Tetapi, tak lama kemudian, ia mengundurkan diri dari parlemen; ia mengatakan: “Saya selalu berbicara keras soal Nasakom.” Dalam hal ini, ia berbeda pendirian dengan sebagian besar tokoh NU waktu itu.¹¹⁰

Di lingkungan NU, karir Kiai Achmad di mulai dari Jember. Tidak lama setelah itu, ia aktif di NU tingkat wilayah Jawa Timur, hingga terpilih ketua umum tingkat wilayah. Karirnya terus berkembang hingga pada Mukhtamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo Jawa Timur yang mengantarkannya ke kursi Ra’is ‘Am PBNU periode 1984-1989. Terangkatnya Kiai Achmad sebagai Ra’is ‘Am PBNU waktu itu bukan tanpa alasan. Kiai Achmad sudah lama di lirik oleh para tokoh NU, di karenakan kepiawaian, kepandaian, dan kecerdasannya.¹¹¹

Pemilu tahun 1977, ia pun kembali menjadi anggota DPR dan sejak itu pula ia kembali ke kota kelahirannya, Jember, untuk memimpin Pondok Pesantren Islam As-Siddiqi Putra hingga tahun 1991. Pada tahun 1911 Kiai

¹⁰⁹ *Ibid.*, 23.

¹¹⁰ *Ibid.*, 24.

¹¹¹ *Ibid.*, 23.



Achmad mulai mengajarkan dan mengembangkan pemikiran tasawufnya secara intens melalui ceramah, pengajian, serta gerakan ritual yang terhimpun dalam jamaah wirid *Dzikir al-Ghafilin*. Melalui *aurad Dzikir al-Ghafilin*, ia berikhtiar untuk menciptakan suasana dan iklim religius guna membentengi masyarakat dalam menghadapi arus global modernitas. Modernitas, bagi Kiai Achmad dipandang sebagai sesuatu yang banyak menimbulkan dampak negatif (mudarat) daripada positif. Selain membimbing jamaah *Dzikir al-Ghafilin*, Kiai Achmad juga mendidik santri-santrinya melalui pengajian kitab kuning, seperti *Tafsir al-Jalalain*, *Riyadh al-Shalihin*, *Hadis Shahih Muslim*, *Risalat al-Muawanah*, *Fathal-Qaribal-Mujib (Taqrīb)*, *Kifayat al-Akhyar*, *al-Adzkar*, *ihya' 'ulum al-Din*, *al-Din al-Islam*, dan sebagainya.¹¹²

Duet kedua tokoh ini berlangsung sejak muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Pesantren Asembagus, Stubondo Jawa Timur. Bahkan, ia merupakan tokoh yang sanggup merangkul kembali para sesepuh NU yang sempat bercerai beraik akibat *mufaraqah*-nya (pemisahan diri) K.H. As'ad Syamsul Arifin sehubungan dengan penolakannya terhadap kepemimpinan PBNU hasil Muktamar ke-28 di Yogyakarta. Menjelang Muktamar NU ke-28, kesehatan Kiai Achmad terus memburuk. Ia mengidap sederet penyakit kronis yang menderanya sejak tahun 1982; kencing manis, jantung, ginjal, hati, saraf, dan oestoporosis (tulang

¹¹² *Ibid.*, 24.



keropos). Anehnya, dalam kondisi yang kritis, warga NU tetap menginginkannya untuk memangku jabatan Ra'is 'Am.

Kiai Achmad jatuh sakit ketika menghadiri Munas Majelis Ulama Indonesia di Jakarta pada tahun 1990. Setahun kemudian (1990), ia terbaring dengan tubuh tak berdaya di kamar inap RS Dr. Soetomo. Kepada pengurus PBNU, ia mengatakan, "Tugas saya di NU sudah selesai." Kalimat ini sekaligus menjadi penanda bahwa ajal akan tiba. Tepat pada tanggal 23 Januari 1991, Kiai Achmad mengembuskan nafas terakhir dengan iringan sejuta tangis. Tetapi, sebelum meninggal Kiai Achmad pernah berpesan kepada keluarganya agar dikubur di pemakaman orang-orang penghafal al-Qur'an di kompleks Pesantren Ploso, Mojo Kediri. Sebab, tempat tersebut dipilih karena diyakini sebagai makam 'Auliya' (para wali) penghafal al-Qur'an.¹¹³

B. Karya-Karya K.H. Achmad Siddiq

Kiai Achmad adalah ulama yang produktif dalam hal tulis-menulis, jadi tidaklah sedikit karya tulisnya yang sempat dipublikasikan, meskipun tidak semuanya dalam bentuk buku. Di antara karya tulis Kiai Achmad yang terkumpul adalah sebagai berikut :

1. Pemikiran Kiai Achmad yang Terkait Langsung dengan Masalah Tasawuf

¹¹³ *Ibid.*, 26.



- a. *Dzikir al-Ghafilin li Man ahabba an Yuhsyar ma' al-Auliya' wa al-Shalihin, majmu'ah min ba'dh Ashhab al-Du'a wa al-Ijazah*. Buku ini diterbitkan tanpa tanggal dan tahun, berisi tentang *asma'al-husna, tawashshulbial-fatihah, shalawat al-muqarrabin*, berbagai doa, dan lain-lain. Buku ini kemudian dijadikan pedoman jamaahnya dalam pelaksanaan wirid *Dzikir al-Ghafilin*.
- b. Fungsi Tasawuf, kumpulan Ceramah Pada Pengajian yang diadakan Pengurus Wilayah Jam'iyah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur pada tahun 1977. Buku ini berisi *Ruh al-'Ibadah* (memberi jiwa pada ibadah), *Tahdzib al-Akhlak* (pembinaan karakter), dan *Taqqarrub Ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah). Oleh karena itu, buku ini membahas tentang beberapa unsur utama dalam bertasawuf untuk mengantarkan seorang *salik* (pelaku tasawuf) dari tingkatan yang paling rendah menuju tertinggi, beberapa motif dalam beribadah, macam-macam akhlak terpuji (*mahmudah*) dan tercela (*madzmumah*), serta tentunya berbagai hal yang terkait langsung dengan ajaran tasawuf.
- c. Sejarah Ringkas Lahirnya *Aurad "Dzikir al-Ghafilin"*, disampaikan pada tanggal 25 Oktober 12986 dalam acara pertemuan rutin khusus keluarga Bani Siddiq pada setiap malam minggu legi. Buku ini menjelaskan sejarah lahirnya wirid *Dzikir al-Ghafilin* beserta orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam pembentukan wirid tersebut, dan keutamaan-keutamaan pengamalan wirid.



- d. *'Uzlah dan Mu'asyarah*, kumpulan ceramah tasawuf pada setiap malam Minggu Legi, tetapi tidak diketahui tanggal dan tahunnya. Berisi pandangan-pandangan Kiai Achmad tentang ulama hakikat dan ulama Syari'at dalam melihat kedudukan *'uzlah dan mu'asyarah*, konsep amar ma'ruf nahi mungkar, serta pandangan Kiai Achmad dalam menyikapi kontroversi konsep *'uzlah dan mu'asyarah*.¹¹⁴
2. Pemikiran Keagamaan, Politik, Ekonomi, Sosial, serta Budaya dalam Prespektif Islam, dan lain-lain:
 - a. Pedoman berpikir Nahdltul 'Ulama (*al-Fikratan-Nahdhiyyah*), di tulis dan diterbitkan oleh Forum Silaturrahi Sarjana Nahdlatul Ulama (FOSSNU) Jawa Timur, 9 Oktober 1969. Buku ini berisi dalil perjuangan yaitu dasar-dasar pikiran yang dipergunakan imam-imam mujtahid di dalam berijtihad atau ber-*istinbath* tentang masalah-masalah hukum agama Islam, terutama imam-imam mazhab Syafi'i. Buku ini juga memuat dalil hukum dalam menanggapi berbagai hal di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan sebagainya.
 - b. Khiththah Nahdhiyyah (Jember, 9 April 1979), buku ini menguraikan ciri jamaah diniyah, kedudukan ulama, ahlusunnah wal jamaah, bahaya-bahaya bagi kemurnian ajaran agama Islam, karakter *at-tawassuth wa*

¹¹⁴ *Ibid.*, 28.



al-i'tidal, pola berorganisasi, konsepsi dakwah, mabarrat, ekonomi, muamalah, dan penutup '*izzu al-Islam wa al-Muslimin*'.¹¹⁵

- c. Islam, Pancasila, dan *Ukhuwwah Islamiyyah*, wawancara Dr. H. Fahmi D. Saifuddin, Lajnah Ta'lif wa al-Nasr (Jakarta), 25 November 1985. Buku ini membahas garis-garis besar Islam, Islam Indonesia, hubungan Pancasila dengan Islam, pengembangan Ukhuwwah Islamiyyah, dan integrasi nasional.
- d. Pemikiran K.H. Achmad Siddiq, kumpulan Makalah yang disunting Abu Nahid, Aula (Surabaya), tahun 1992. Buku ini berisi konsepsi seputar akidah, syariat, tasawuf, dan khittah NU 26, hubungan agama dan Pancasila, negara Ri bentuk Final, watak sosial *ahlusunnah*, serta seni dan agama.
- e. Norma-norma Pancasila menurut Pandangan Islam (disampaikan pada tahun 70-an, rencananya akan disampaikan dalam seminar di Aceh, tetapi karena sesuatu hal, Kiai Achmad Siddiq urung berangkat. Tulisan ini menjelaskan hubungan antara agama Islam dan Pancasila dan mendudukan antara keduanya pada kedudukan yang semestinya, sehingga keduanya tidak perlu dipertentangkan.¹¹⁶
- f. Hanya Pribadi Berkualitas yang Mampu Mewujudkan Jam'iyah Berkualitas. Tulisan ini disampaikan pada acara halalbihalal 12 Juni

¹¹⁵ *Ibid.*, 29.

¹¹⁶ *Ibid.*, 30.



1989, yang diselenggarakan oleh PCNU Surabaya di gedung Islamic Centre Surabaya, dimuat juga dalam majalah Aula, yang dikeluarkan PWNU Jawa Timur, NO. 10, 6 Agustus 1989. Tulisan ini membahas soal-soal potensi dasar yang dimiliki jamaah NU, pengembangan wawasan orang-orang NU, dan peningkatan kemampuan serta keterampilan orang-orang NU demi menunjang potensi nasional.

- g. Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar sebagai Langkah Pembinaan *Khairah Ummah* dalam Masyarakat Pancasila (disampaikan pada tanggal 2 Mei 1983, dan mengenai tempat penyampaiannya tidak dijelaskan). Tulisan ini memuat kedudukan amar ma'ruf-nahi munkar bagi NU, *amar ma'ruf-nahi munkar* dan hubungannya dengan pembinaan *khairah ummah*, langkah-langkah menuju terbinanya *khairah ummah*, dan penerapan *amar ma'ruf-nahi munkar* di dalam masyarakat Pancasila.
- h. Hubungan Agama dan Pancasila (disampaikan pada tanggal 14-15 Maret 1985). Sebuah makalah untuk pertemuan ilmiah "Peranan agama dalam memantapkan ideologi negara" yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama RI. Di sini pertama-tama dijelaskan hakikat Islam dan berbagai variannya, kemudian menjelaskan materi pancasila, disusul dengan hubungan antara Islam dan Pancasila, sehingga menjadi sebuah ideologi bangsa Indonesia.



- i. Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama (disampaikan pada tanggal 13 Desember 1983). Sebuah makalah yang didiskusikan di rumah K.H. Masykur, Jl. Imam Bonjol 22, Jakarta, sebagai bahan Munas (Musyawarah Nasional) alim ulama di Situbondo Jawa Timur. Berisi tentang hakikat NU dan kedudukan ulama di dalamnya. langkah-langkah organisatoris NU, serta hak berpolitik bagi NU danarganya.¹¹⁷
- j. Pengembangan *Ukhuwwah Islamiyyah* (tidak diketahui tanggal, tahun, dan tempat penyampaianya). Tulisan ini menjelaskan tiga wawasan, yaitu wawasan keagamaan, kemasyarakatan, dan kesemestaan (universalitas). Ketiga wawasan ini terwujud dalam *tri-ukhuwwah*, yakni *ukhuwwah Islamiyyah*, *basyariyyah*, dan *wathaniyyah*.

C. Pandangan K.H. Achmad Siddiq :

Pandangan kenegaraan K.H. Achmad Siddiq yang terpenting adalah pandangannya tentang negara Republik Indonesia dan pandangannya tentang Pancasila.¹¹⁸ Begitu juga dengan pandangan Kiai Achmad Siddiq tentang Islam dan Pancasila yang akan dipaparkan di bawah ini.

1. Relasi Islam dan Pancasila

¹¹⁷ *Ibid.*, 31.

¹¹⁸ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am*, 168.



Dalam masalah Islam dan Pancasila pertanyaan-pertanyaan mendasar dikemukakan : bagaimana kedudukan Pancasila di hadapan agama (Islam), bagaimana sikap umat Islam dengan Pancasila sebagai azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta implikasinya terhadap interaksi sosial umat Islam sehubungan dengan penerimaan Pancasila tersebut.

Tentang kedudukan Pancasila di hadapan Islam, Kiai Achmad Siddiq menegaskan bahwa Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah agama. Ideologi, pada umumnya diartikan berkaitan dengan cita-cita, filsafat, program perjuangan, strategi, sasarannya, dan sebagainya. Tak dapat dipungkiri, karena kompleksnya hal-hal yang terkandung dalam ideologi sehingga mampu mempengaruhi watak dan tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ada yang secara berlebih-lebihan menganggap bahwa “Ideologi adalah agama.” Padahal biar bagaimanapun hebatnya ideologi ia tetap hasil pemikiran manusia tidak akan sampai ke derajat agama.¹¹⁹

Seorang pemeluk agama boleh saja berfilsafat, berideologi, berbudaya, berdasar negara dan sebagainya, asal ideologi dan sebagainya itu tidak bertentangan dengan ajaran agamanya, dan dapat menempatkan agama

¹¹⁹ *Ibid.*, 173.



dan ideologinya (yang tidak bertentangan dengan agamanya) pada tempatnya masing-masing secara tepat.¹²⁰

Dalam hubungan antara agama dan Pancasila, keduanya dapat sejalan, saling menunjang dan saling menguatkan. Keduanya dapat bersama-sama dilaksanakan dan diamankan, tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang dan meninggalkan yang lainnya. Karena itu, sangat tepat kebijaksanaan pemerintah bahwa Pancasila tidak akan diagamakan dan agama tidak akan dipancasilakan.¹²¹ Sesungguhnya salah satu masalah besar bagi bangsa Indonesia zaman ini ialah bagaimana memproporsionalisasikan (*wad'u syaiin fimahallih*). Sesungguhnya, banyak faktor yang merupakan modal dasar bagi upaya proporsionalisasi Pancasila dan agama, khususnya Islam, antara lain:

- a. Sama-sama berwatak akomodatif.
- b. Subtansi (*mahiyah*) masing-masing sejalan.
- c. Bangsa Indonesia adalah bangsa beragama.¹²²

Sehingga benar-benar terbukti bahwa di dalam negara dan masyarakat Pancasila ini agama dapat diamankan dengan baik dan sebaliknya

¹²⁰ Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*, (Jakarta : PT Duta Aksara Mulia, 1992), 124.

¹²¹ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am*, 174

¹²² Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad*, 124



umat beragama di negari ini merupakan tulang punggung ideologi Nasional Pancasila.

Diakui masih ada hambatan bagi proporsionalisasi itu, terutama berwujud hambatan psikologis, yaitu kecurigaan dan kekhawatiran dari dua arah. Dari satu arah, ada kecurigaan dan kekhawatiran bahwa negara Republik Indonesia akan menjadi negara Agama tertentu yang merugikan pemeluk agama lain. Dari arah lain terdapat kecurigaan dan kekhawatiran bahwa Pancasila akan dijadikan semacam agama nasional yang menggantikan atau paling tidak mendangkalkan jiwa agama-agama.¹²³

Umat Islam menerima Pancasila, bukan sekedar taktik melainkan ada tiga pertimbangan.

Pertama, umat Islam Indonesia (melalui para pemimpinnya) ikut aktif dalam perumusan dan kesepakatan tentang Dasar Negara itu. Sembilan tokoh utama bangsa yang terkenal dengan Panitia Sembilan, berhasil menyusun rancangan rumusan yang ketika itu disetujui oleh semua pihak dan akan dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara (Piagam Jakarta), yang lalu diterima dan disahkan dalam sidang pleno BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945.

Kedua, secara substansial nilai-nilai luhur yang dirumuskan menjadi dasar negara itu dapat disepakati dan dapat dibenarkan menurut pandangan

¹²³ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am*, 174



Islam. misalnya, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan Tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islam (al-Qur'an surah al-ikhlas). Demikian pula mengenai empat sila berikutnya. Kalau ditampilkan satu persatu maka tidak ada satupun yang bertentangan dengan agama (khususnya Islam). Bahkan urutan-urutan Pancasila itu dapat dibaca dalam kerangka '*aamanu wa amilus shalihah.*' Kalau soal pertama dianggap sebagai pencerminan '*aamanu*' maka kiranya tidak terlalu keliru kalau empat sila berikutnya dapat mencerminkan '*amilus shalihah.*'

Ketiga, umat Islam berkepentingan dengan memantapkan peranan agama dalam penghayatan dan pengamalan ideologi nasional dan sebaliknya negara Pancasila agama terhayati dan teramalkan secara lebih baik. Bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, tetapi karena pada diri Islam sendiri memuat dan membawa nilai-nilai luhur yang bersumber pada wahyu yang dapat memberi kontribusi bagi pembangunan Nasional dan dalam Pembinaan Hukum Nasional.¹²⁴ Selain dari ketiga tersebut, Nahdlatul Ulama menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang terkandung di dalam Undang-Undang 1945 (*bil lafzi wal ma'na murad*), dengan rasa tanggung jawab dan tawakkal kepada Allah.¹²⁵

2. Islam dan NKRI

¹²⁴ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais 'Am*, 175.

¹²⁵ Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad*, 71.



Di dalam wadah negara Republik Indonesia dan di tengah-tengah masyarakat Indonesia itulah, kita ber-amar ma'ruf dan ber-nahi munkar mengusahakan terwujudnya *Khairah Ummah*.¹²⁶

Negara sebagai salah satu wujud persekutuan sosial plus kekuasaan di dalamnya, juga merupakan salah satu sarana untuk menciptakan tata kehidupan yang diridhoi oleh Allah SWT. Yang tidak boleh dilupakan ialah bahwa perjuangan da'wahilallah ini harus dilakukan dengan cara yang diridhoi oleh Allah pula, guna menuju *rahmatan li al-'amin*.¹²⁷

Negara Republik Indonesia lahir dan tegak berdiri sebagai hasil perjuangan seluruh golongan rakyat Indonesia dengan penuh pengorbanan harta, air mata dan jiwa para pahlawan dan syuhada. Atas dasar kesepakatan para pembentuk negara bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Pancasila seperti termuat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1954. Pancasila itu merupakan lima gagasan dasar atau serangkaian lima asas bernegara di Indonesia. Bernegara adalah kebijaksanaan untuk mengorganisasikan masyarakat negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

¹²⁶ *Ibid.*, 109.

¹²⁷ *Ibid.*, 117.



kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹²⁸

Dalam negara Pancasila, negara mempunyai peranan penting dalam pembangunan di berbagai sektor, termasuk pembangunan dalam pembangunan sektor agama dan sebaliknya juga agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara.¹²⁹

Walaupun negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa tidak berarti bahwa negara Indonesia adalah negara teokrasi atau negara berdasarkan atas suatu agama tertentu. Sebagai bangsa yang beragama, kita menghendaki dan berkeinginan dalam rangka melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, agar nilai-nilai agama (khususnya nilai-nilai luhur Dinul Islam) benar-benar dapat menjiwai kehidupan kita, dihayati dan diamalkan oleh masyarakat dan insan Pancasila sebagai manifestasi dan pencerminan taqwanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa.¹³⁰

Pasti terdapat sinkronisme penuh antara sunnatullah dan Dinullah, sehingga perjalanan dan perkembangan seluruh alam ini tidak terlepas dari garis “Skenario dan Pengendalian Agung” (Qadla dan Qadar) menuju

¹²⁸ *Ibid.*, 112.

¹²⁹ *Ibid.*, 113.

¹³⁰ *Ibid.*, 113.



sasaran yang sudah ditetapkan-Nya pula, yaitu *rahmatan li al-‘amin*, dan oleh karena itu Dinullah bersifat universal.¹³¹

Adapun karakteristik agama Islam yang paling esensial adalah: (1) prinsip *al-tawassut*, jalan pertengahan, tidak *tatarruf* (ekstrem), kekanan-kananan atau kekiri-kirian; (2) sasarannya adalah *rahmatan li al-‘amin*.¹³² Sesuai dengan “Strategi dan Skenario Agung.” Singkronisme antara sunnatullah dan Dinullah ini berkelanjutan dengan sifat/watak “fitri” pada Islam. (Q.S. Rum: 30). Yaitu, bahwa Islam itu sejalan dengan nilai-nilai/kecenderungan-kecendrungan yang positif yang sudah ada pada manusia sejak aslinya. Tentu positifitas ini menjadi mantap setelah dikokohkan oleh Dinullah. Tugas utama yang diemban oleh Rasulullah Saw., ialah menyempurnakan nilai-nilai positif (*makarimal akhlaq*) itu (Q.S. Syu’ara : 74).

Logislah kalau Islam mengakui adanya nilai-nilai positif yang mungkin sudah tumbuh dan sudah ada pada manusia atau kelompok manusia sebelum menerima ajaran Islam. terhadap nilai-nilai “lama” ini Islam tidak bersikap apriori menolak, menentang dan menghapusnya sama sekali, tetapi Islam bersikap akomodatif, selektif dan proporsional.¹³³

¹³¹ *Ibid.*, 114.

¹³² Samsul Munir Amin, *Percik Pemikiran Para Kiai*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009), 129.

¹³³ Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq*, (Jakarta : PT Duta Aksara Mulia, 1992), 115.



3. Ukhuwah dan Negara

Masalah yang merisaukan bangsa Indonesia adalah belum terintegrasinya secara tuntas antara perbedaan agama dan etnis dalam satu bingkai Bineka Tunggal Ika. K.H. Achmad Siddiq sebagai satu ulama brilian yang dimiliki Nahdlatul Ulama mencoba memberikan solusi dalam pola hubungan masyarakat Indonesia yang majemuk ini dengan konsep yang diambil dari ajaran Islam, yang dikenal dengan tri ukhuwahnya; *ukhuwah al-Islamiyah*, *ukhuwah al-wathaniyah*, dan *ukhuwah al-Insaniyah (basyariyah)*.¹³⁴ Konsep tri ukhuwah ini adalah wujud nyata dari prinsip-prinsip *at-tawassuth*, *al-i'tidal*, dan *at-tawazun* dalam bidang muasyarah (pergaulan antar golongan).¹³⁵ Kunci pertama bagi tumbuh dan berkembangnya *Ukhuwah al-Islamiyah* adalah kesamaan wawasan, terutama dalam beberapa hal pokok, tanpa mengesampingkan perbedaan mengenai hal-hal yang tidak pokok. *Ukhuwah al-Islamiyah* yang berkembang sehat di Indonesia bukan saja akan bermanfaat bagi kaum muslimin Indonesia

¹³⁴Rudy Al Hana, "Pemikiran K.H. Achmad Siddiq Tentang Ukhuwah Islamiyah, Wathaniyah, Basyariyah", *Study Islam*, vol IV (Agustus, 2004), 2.

¹³⁵ Syamsun Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad Siddiq*, 88.



sendiri, tetapi juga sangat bermanfaat bagi negara dan bangsa Indonesia serta kaum muslimin di seluruh dunia.¹³⁶

Konsep *ukhuwwah* yang dikembangkan Kiai Achmad Siddiq adalah sebagai berikut:

- a. *Ukhuwwah Islamiyah*, yaitu *ukhuwah* yang tumbuh dan berkembang karena persamaan keamanan atau keagamaan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- b. *Ukhuwah wataniyyah*, yaitu *ukhuwwah* yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa nasionalisme.
- c. *Ukhuwwah Insaniyah (basyariyyah)*, yaitu *ukhuwwah* yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan.¹³⁷

Ukhuwah al-Islamiyah sebagai modal untuk melakukan pergaulan sosial dengan sesama muslim. Dengan semangat ini perbedaan-perbedaan yang tidak prinsip antar umat Islam tidak perlu menyebabkan perpecahan. Yang diperlukan bagi terciptanya *Ukhuwah al-Islamiyah* ini adalah pengembangan saling pengertian, saling menghormati dan tidak mengklaim kebenaran sendiri, agar jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia dapat saling mengisi.

¹³⁶ PBNU, *Wawancara Dengan Rais Aam PBNU, K.H. Achmad Siddiq*, (Jakarta : Lajnah Ta'lif Wa Nasyar PBNU 1985), 15.

¹³⁷ Syamsun Ni'am, *The Wisdom of K.H. Achmad*, 88.



Ukhuwah wataniyah, sebagai modal untuk melakukan pergaulan sosial dan dialog dengan berbagai komponen bangsa Indonesia. Islam mengakui adanya kelompok-kelompok manusia, bangsa, kabilah dan perbedaan agama. Orang tidak perlu dibedakan hanya karena adanya perbedaan agama dan keyakinan. Seperti terbukti dalam proses pembentukan bangsa Indonesia, umat Islam bersama-sama dengan kelompok lain berproses dalam pembentukan bangsa itu.¹³⁸

Dua macam *ukhuwwah* yang disebut lebih dulu (*ukhuwwah Islamiyah* dan *wataniyyah*) merupakan landasan bagi terwujudnya *ukhuwwah Insaniyah (basyariyyah)*. Kedua *ukhuwwah* itu harus dijalankan bersama-sama dan serentak karena keduanya saling mendukung dan saling membutuhkan, tidak boleh dipertentangkan satu dengan yang lain.¹³⁹

4. Ahlusunnah Wal Jamaah Dalam Politik Di Indonesia

Ahlusunnah Wal Jamaah, pada zaman Rasulullah sampai kira-kira tiga dasawarsa sesudah wafat beliau, semua kaum muslimin adalah *Ahlusunnah* (lengkapnya “*Ahlusunnah Wal Jama’ah*”). Semua masih berada di atas garis yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dan diamalkannya bersama

¹³⁸ Hairus Salim HS dan Ridwan Fakla As, *Biografi lima Rais ‘Am*, 177.

¹³⁹ Syamsun Ni’am, *The Wisdom of K.H. Achmad*, 88.



para sahabat *ma ana ilaihi al-yauma wa ashabih*, baik di dalam urusan *hablun minallah* maupun di dalam urusan *hablun minannas*.¹⁴⁰

Nahdlatul Ulama yang menegaskan dirinya sebagai *Ahlusunnah*, mengambil posisi sebagai salah satu kelompok *Ahlusunnah*.¹⁴¹ Nahdlatul Ulama yang organisasi Islam, yang segala sikap dan gerak langkahnya selalu bersumber dan berpatokan kepada ajaran Islam, dan justru syari'at Islam inilah yang akan ditegakkan oleh NU.¹⁴²

Sejak didirikannya (1344 H./1926 M.) sampai berakhirnya penjajahan Belanda (1361 H./1942.) Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi keagamaan bergerak membina umat menurut wawasan keagamaannya yang memang sesuai dengan wawasan keagamaan mayoritas kaum muslimin Indonesia.

Sejak penjajahan Jepang menggantikan penjajahan Belanda, maka semua organisasi yang didirikan oleh masyarakat dilarang bergerak. Yang boleh bergerak hanyalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang atau yang sesuai dengan kehendak Jepang. Setelah Jepang mendekati kealahannya,

¹⁴⁰ Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad*, 39.

¹⁴¹ *Ibid.*, 42.

¹⁴² K.H. Achmad Siddiq, *Pedoman Berpikir Nahdlatul Ulama*, (Surabaya : FOSNU JATIM, tt), 12.



beberapa organisasi diizinkan bergerak lagi, tetapi di bawah pengawasan yang sangat ketat dan keras dari Jepang.¹⁴³

Pada situasi dan kondisi perang kemerdekaan itu pula, Nahdlatul Ulama bersedia menerima dan mendukung satu-satunya partai politik Islam (November 1945). Setelah revolusi fisik selesai dan perjuangan mengisi kemerdekaan dimulai secara lebih intensif, maka kondisi dan konstelasi politik di negara ini berubah pula. Pada tahun 1373 H./1952 M., Nahdlatul Ulama mengambil kedaulatannya sendiri menjadi organisasi yang berdiri sendiri disertai ajakan untuk mewujudkan partai politik Islam yang bersifat federatif.¹⁴⁴ Nahdlatul Ulama menjadi partai politik tanpa meninggalkan urusan-urusan yang telah seperempat abad ditanganinya, yaitu urusan Ma'arif (pendidikan), Mabarrat (sosial) dakwah dan muamalah, satu hal yang kurang lazim dilakukan oleh partai politik. Sebab, partai politik pada zaman itu, harus berebut massa sebanyak-banyaknya.¹⁴⁵

Ketika kedudukan Ulama di dalam tubuh Nahdlatul Ulama semakin sentral, maka sejarah mencatat bahwa telah terjadi pergeseran kedudukan ulama di dalam Nahdlatul Ulama. Bahkan tenaga “teknokrat” (tanfiziyah) yang seharusnya menjadi “orang kepercayaan” ulama, justru menentang (dan

¹⁴³ K.H. Achmad Siddiq, *Khitthah Nahdliyyah*, (Surabaya : Khalista, 2005), 3.

¹⁴⁴ *Ibid.*, 4.

¹⁴⁵ *Ibid.*, 5



bahkan menantang ulama yang nota bene mempunyai kedudukan formal secara organisatoris (*Syuriyah*). Sikap inilah yang menggoyahkan sendi-sendi Nahdlatul Ulama.¹⁴⁶

Dengan K3-26, tidak berarti NU menjadi “anti politik.” Atau mengharamkan politik, mengharamkan kursi DPR/MPR/DPRD. Dengan K3-26, NU hanya membenahi dirinya sebagai organisasi dalam hubungannya dengan organisasi politik dan dengan pekerjaan politik praktis. Demikian ketika NU dilahirkan dan demikian pula setelah NU kembali kepada Khittah 1926, sebagai organisasi NU tidak mau terikat lagi dengan salah satu organisasi politik yang manapun.¹⁴⁷

Gerakan operasional Nahdlatul Ulama dilakukan berdasar; pandangan hukum Aqidah dan syari’ah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, program kerja, tata kerja dan keputusan-keputusan yang ditetapkan atau disahkan oleh pengurus Syuriyah. Pengurus Syuriyah Kolektif (tidak individu) berwenang membatalkan rencana kerja dan/ atau menghentikan pelaksanaannya kalau ternyata bertentangan dengan ajaran atau kepentingan Islam, bertentangan dengan AD/ART, program kerja dan/ atau keputusan yang ditetapkan.

Cita-cita dan langkah Nahdlatul Ulama sejak didirikan bertumpu pada gerakan *ishlaah* (perbaikan dan peningkatan kebaikan). Hal ini sejalan

¹⁴⁶ *Ibid.*, 66

¹⁴⁷ *Ibid.*, 91



dengan tujuan pembangunan nasional sekarang ini. Yaitu Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama berpartisipasi aktif dan positif dalam gerak pembangunan bangsa dan negara, bukan saja sebagai pemenuhan kewajiban nasional, tetapi juga sebagai kewajiban keagamaan dan sebagai usaha merealisasikan cita-citanya sendiri.¹⁴⁸

Hak berpolitik adalah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama. Tetapi Nahdlatul Ulama bukanlah wadah kegiatan berpolitik praktis. Penggunaan hak berpolitik harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, mengikuti kaidah agama dan moral yang luhur, sehingga tercipta budaya politik yang sehat.

Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama menghargai warga negara yang menggunakan hak politiknya secara baik dan bersungguh-sungguh. Dan memberikan kebebasan penuh kepada warganya untuk masuk atau tidak masuk suatu organisasi politik yang manapun dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui organisasi politik pilihan itu, selama dipandang bermanfaat dan tidak merugikan Islam dan perjuangan umat Islam.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad*, 68.

¹⁴⁹ *Ibid.*, 69.



Ada dua hal tentang “politik” yang harus dibedakan, karena memang berbeda jauh. Pertama: Budaya politik, kedua: Politik praktis. Perbedaannya sebagai berikut:

- a. Budaya politik ialah sikap dan tingkah laku yang sudah mapan di dalam melakukan perbuatan politik. Mungkin budaya politik itu masih rendah, kotor, curang dan mungkin sudah luhur, jujur bertanggung jawab dan bermoral. Dengan tegas, NU menginginkan terwujudnya budaya politik yang sehat dan berakhlak. NU akan bertindak terhadap warganya seseorang warganya yang melakukan perbuatan politik secara melanggar agama, sebagaimana mungkin NU bertindak terhadap warganya yang menjadi karyawan yang melakukan korupsi, penipuan dan sebagainya.¹⁵⁰
- b. Politik praktis ialah perbuatan politik yang langsung menuju sasaran untuk mendapatkan kekuasaan atau bagian kekuasaan melalui kursi-kursi perwakilan. Dalam hal ini, tegas NU secara organisatoris tidak lagi turut campur. Penggunaan hak politik warga negara yang diberikan oleh undang-undang, terserah sepenuhnya kepada masing-masing pribadi warga NU, dengan pesan wanti-wanti : pergunakanlah hak itu secara bertanggungjawab, sesuai dengan budaya politik yang sehat.¹⁵¹

¹⁵⁰ *Ibid.*, 92.

¹⁵¹ *Ibid.*, 93.



Sebagai organisasi, NU tidak mau terikat lagi dengan salah satu organisasi politik yang manapun. NU tidak lagi terlibat di urusan “politik praktis”. Sebagaimana warga NU boleh masuk atau tidak masuk klub olahraga manapun.¹⁵² Tetapi, ketika warga NU dalam memasuki sesuatu Orpol, warga NU tidak perlu minta restu atau dukungan dari NU, dan “ngaku-ngaku” mendapat restu dari NU untuk mendapat barakahnya NU. Demikian juga, kalau “disana”, menghadapi kesulitan, jangan merengek-rengok supaya NU turun tangan!

Untuk mencegah supaya NU tidak terbawa-bawa di dalam arena rebutan pengaruh, dan supaya tugas serta kewenangan sebagai pengurus inti NU tidak berbaur dengan tugas/kewenangan sebagai pengurus Orpol (yang manapun), maka diadakanlah larangan perangkapan jabatan. Pengurus inti NU tidak boleh merangkap menjadi pengurus inti sesuatu parpol. Warga NU yang bukan pengurus inti NU boleh menjadi pengurus inti sesuatu parpol. Warga NU yang menjadi anggota/pengurus Orpol manapun masih tetap warga NU selama masih menunjukkan kesetiannya kepada NU.¹⁵³

5. Etika Politik Dalam Kehidupan Bangsa

Etika politik Etika politik *Ahlusunnah Wal Jamaah* adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar sebagai langkah pembinaan *Khairah Ummah* dalam

¹⁵² *Ibid.*, 91.

¹⁵³ *Ibid.*, 92.



masyarakat Pancasila. Kedudukan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar bagi Nahdlatul Ulama sebagai alat perjuangan Islam. Nahdlatul Ulama sejak semua sudah menetapkan bagi dirinya sendiri, memilih sebagian “pembinaan masyarakat” (*society bulding*).¹⁵⁴ Akan tetapi umat terbaik tentu harus memiliki sifat-sifat yang baik itu disebut satu persatu, secara terperinci. Yang dapat disebut, hanyalah garis-garis besar dari kumpulan sifat-sifat yang baik tersebut.¹⁵⁵

Menemukan garis besar dari sifat-sifat *Khairah Ummah*, yaitu: taqwa yang penuh utuh dan mantab, (penuh, utuh: *haqqa tuqaatih*, mantab, tak tergoyahkan, terbawa sampai mati), berpegang teguh kepada ajaran-ajaran (Agama) Allah, tidak menempuh jalan simpangan, bersatu padu, dengan ikatan aqidah, melakukan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar.¹⁵⁶

Pada tahun 1935-an, Nahdlatul Ulama sudah pernah melancarkan “gerakan” yang disebut “Mabadi’ *Khairah Ummah* yang berisi, *al-shidqu* (kebenaran, kejujuran), *al-Wafa-u Bil ‘ahdi* (menepati janji), *at-ta’awanu* (tolong menolong). Gerakan *mabadi’ Khairah Ummah* ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama pada zaman itu sudah mempunyai program kerja

¹⁵⁴ *Ibid.*, 96.

¹⁵⁵ *Ibid.*, 101.

¹⁵⁶ *Ibid.*, 103.



yang sistematis. Mungkin lebih sistematis dari pada Nahdlatul Ulama zaman modern.¹⁵⁷

Dari uraian tersebut, menjadi jelas adanya hubungan timbal balik antara *khaira Ummah* dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Umat yang “*Khairah Ummah*” adalah umat yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar (disamping sifat-sifat yang lain), dengan amar ma'ruf dan nahi munkar yang dilakukan secara benar, teratur dan terarah akan terwujud *Khairah Ummah*.¹⁵⁸ Dan NU berpesan: di mana pun anda berpolitik praktis, berbuatlah secara bertanggung jawab dan berakhlaklah dengan *al-akhalaqul karimah*!¹⁵⁹

¹⁵⁷ *Ibid.*, 104.

¹⁵⁸ *Ibid.*, 105.

¹⁵⁹ *Ibid.*, 92.